

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 *Theory of Planned Behavior*

Teori ini dilandasi pada postulat teori yang menyatakan bahwa perilaku merupakan fungsi dari informasi atau keyakinan serta kepercayaan yang menonjol mengenai perilaku tersebut. Orang dapat saja memiliki berbagai macam keyakinan terhadap suatu perilaku, namun ketika dihadapkan pada suatu kejadian tertentu, hanya sedikit dari keyakinan tersebut yang timbul untuk mempengaruhi perilaku. Sedikit keyakinan inilah yang menonjol dalam mempengaruhi perilaku individu, (Ajzen, 2018 dalam Prihatiningsih, 2022).

Theory of Planned Behavior relevan untuk menjelaskan perilaku dari aparat desa di Desa-Desa Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dalam mengelola keuangan desa. Lebih lanjut juga dijelaskan bahwa sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut, kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya. Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran aparat desa terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi negara, dimana pada dasarnya mereka menyadari apa yang menjadi hak dan kewajibannya, akan tetapi mereka terkadang mencoba mengelak dan mengabaikan.

2.2 Akuntabilitas Publik

a. Pengertian Akuntabilitas

Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua kegiatan yang berada di bawah tanggung jawabnya kepada penerima amanah, yang memiliki hak dan wewenang memikul tanggung jawab pemegang amanah. Oleh karena itu, tanggung jawab tidak bersifat abstrak tetapi konkret dan harus ditentukan oleh undang-undang melalui serangkaian prosedur konkret mengenai masalah yang akan dipertimbangkan. Akuntabilitas menyangkut cara di mana prosedur hukum diikuti untuk membentuk keputusan administrasi

publik yang harus dihormati oleh pejabat dan lembaga publik (Prihatiningsih 2022).

b. Pengertian Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas Publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agen) untuk menjelaskan, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan semua kegiatan dan kegiatan yang berada di bawah tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal), yang memiliki hak dan wewenang untuk menuntut tanggung jawab tersebut. Tanggung jawab publik mencakup dua jenis, yaitu:

1. Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah. Pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada DPR.
2. Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

c. Dimensi Akuntabilitas

Mardiasmo (2019:21) terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yang diantaranya sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (*Accountability for Probity and Legality*).
2. Akuntabilitas Proses (*Process Accountability*).
3. Akuntabilitas Program (*Program Accountability*).
4. Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*).

Menurut Ellwood (2015) dalam Mardiasmo (2018) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu :

1. Akuntabilitas Kejujuran (*Accountability for Probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*Abuse of Power*), sedangkan Akuntabilitas Hukum (*Legal Accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas Proses (*Process Accountability*) akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.
3. Akuntabilitas Program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
4. Akuntabilitas Kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan- kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Patarai (2015) Lima jenis atau mekanisme akuntabilitas publik, yaitu :

1. Akuntabilitas organisasi atau administrasi,
 2. Akuntabilitas hukum
 3. Akuntabilitas profesional
 4. Akuntabilitas politik, dan
 5. Akuntabilitas moral.
-
1. Akuntabilitas organisasi atau administrasi adalah pengawasan yang dilakukan oleh pegawai yang memiliki hirarki lebih tinggi terhadap perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh pegawai pada level yang lebih rendah, biasanya dalam organisasi yang sama. Akuntabilitas jenis ini merupakan bagian dari sistem kontrol internal yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan kepada pimpinan (atasan) apabila mereka tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh seorang pegawai (bawahan)
 2. Akuntabilitas hukum (*legal accountability*) berhubungan dengan ketersediaan mekanisme hukum yang dapat digunakan oleh warga negara untuk menentang keputusan yang dibuat oleh pegawai atau lembaga pemerintah. Contoh mengenai hal ini, ketika seorang pegawai atau lembaga pemerintah harus mempertanggung jawabkan keputusan yang mereka buat di pengadilan. Dengan konsep

akuntabilitas hukum ini maka masyarakat yang tidak puas dengan keputusan pemerintah atau perilaku pegawai pemerintah dapat mengajukan keberatan melalui pengadilan, baik pengadilan umum maupun pengadilan tata usaha negara (administrative tribunal). Pengadilan menjadi instrumen yang memutuskan apakah keputusan atau perilaku pegawai atau lembaga pemerintah telah melanggar hak-hak masyarakat termasuk dalam memberikan pelayanan publik.

3. Akuntabilitas politik (*political accountability*) beranggapan bahwa pegawai dan lembaga pemerintah bertanggung jawab kepada masyarakat melalui lembaga politik. Oleh karena itu, agar akuntabilitas pegawai atau lembaga pemerintah dapat ditingkatkan maka masyarakat harus mampu mengkritisi lembaga politik yang selanjutnya akan menekan pegawai atau lembaga pemerintah. Dengan kata lain, apabila masyarakat tidak puas dengan pelayanan yang diterima dari pegawai atau lembaga pemerintah maka mereka harus melaporkannya kepada aktor politik yang merupakan wakil atau representasi mereka.
4. Akuntabilitas profesional (*professional accountability*), Jenis akuntabilitas ini didasari pada etika profesi. Para professional akan menerima hukuman apabila dalam menjalankan tugas dan kewajibannya melanggar etika profesi. Norma yang mengatur perilaku profesional dianggap selalu sejalan dengan kepentingan masyarakat.
5. Akuntabilitas moral (*moral accountability*) didasari pada anggapan bahwa dalam setiap tindakan dan keputusan yang dibuat pegawai pemerintah selalu menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang beralaku di masyarakat. Nilai-nilai moral ini sebagai alat kontrol yang efektif yang dapat mencegah pegawai pemerintah bertindak atau berperilaku yang merugikan masyarakat. Namun nilai-nilai moral ini masih perlu dibuatkan koridor yang mengarahkan aparat kepada tindakan yang menunjukkan nilai-nilai moral dimaksud, koridor tersebut dapat berupa regulasi dan dapat berupa kebijakan dan kelembagaan masyarakat.

2.3 *Value for Money*

a. Pengertian *Value for Money*

Suharto (2019: 121), menjelaskan bahwa *value for money* adalah *value for money* untuk melihat apakah uang organisasi dapat memperoleh keuntungan dari barang atau jasa dari sumber daya yang disediakan pada saat itu sambil mempertimbangkan kombinasi antara kualitas, biaya, penggunaan sumber daya dan kecukupan dengan menguji kecepatan dan kemudahan pencapaian tujuan (Prihatiningsih 2022).

Imperial College London (2019) *Value for money* adalah istilah yang digunakan untuk menilai apakah suatu organisasi dapat memperoleh manfaat maksimal dari barang dan jasa dalam batas sumber daya yang tersedia. Ini tidak hanya mengukur biaya barang dan jasa, tetapi juga mempertimbangkan kualitas, biaya, penggunaan sumber daya, kecepatan, dan kemudahan untuk mengukur nilai barang dan jasa. *Value for money* memiliki tiga aktivitas utama, yaitu : ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Senada dengan konsep diatas, (Suharto, 2018 dalam Prihatiningsih, 2022) juga menyatakan bahwa *value for money* dinilai dalam 3 aspek yakni : ekonomis, efektivitas, dan efisiensi. *Value For Money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

b. Konsep *value for money*

Penerapan konsep *value for money* dalam pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik tentunya memberikan manfaat bagi organisasi itu sendiri maupun masyarakat. Manfaat yang diinginkan dalam melakukan *value for money* pada organisasi sektor publik yaitu : ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya, dan efektif (berhasil guna) dalam mencapai tujuan dan sasaran (Mardiasmo 2018 : 130 dalam Prihatiningsih, 2022).

Indikator dalam *Value For Money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintahan. Berikut pengertian dari masing-masing indikator tersebut :

1. Ekonomis

Ekonomis merupakan pemerolehan *input* dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomis dapat diartikan sebagai suatu perbandingan pada *input* (masukan) dengan *input value* (nilai dari masukan), yang dinyatakan dengan satuan moneter. Ekonomis terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat menjalankan dan meminimalisir *input resource* dengan menghindari sebuah pengeluaran yang tidak produktif atau pengeluaran yang boros (Mardiasmo, 2009:4 dalam Trilaksono, 2020).

2. Efisiensi

Efisiensi merupakan pencapaian *output* yang maksimal dengan nilai *input* tertentu atau penggunaan *input* yang serendahnyanya untuk mencapai suatu *output* tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dengan *input* yang kemudian dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2009:4 dalam Trilaksono, 2020)

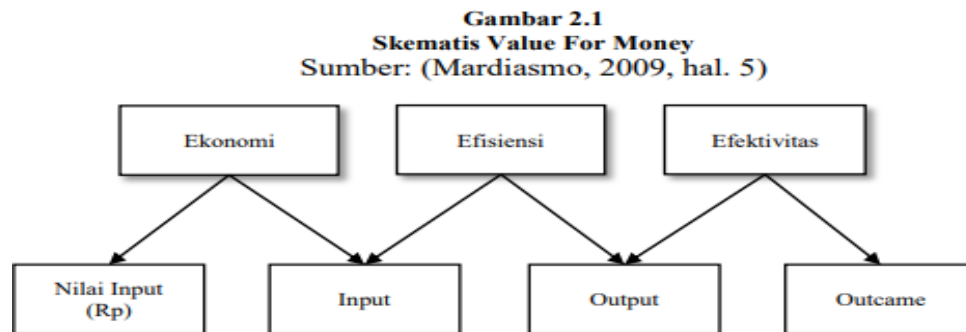
3. Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu tingkatan dari pencapaian hasil program maupun kegiatan organisasi dengan target yang telah ditetapkan. Kegiatan operasional dapat dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut dapat mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *input* (Mardiasmo, 2009:4 dalam Trilaksono, 2020).

Nordiawan (2018) menjelaskan bahwa hal yang paling penting untuk diingat adalah efisiensi tidak menunjukkan berapa banyak uang yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya dapat melebihi perkiraan, mungkin dua kali lipat atau bahkan tiga kali lipat dari perkiraan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Mardiasmo, 2019 hal. 134 dalam

Prihatiningsih, 2022).

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa ketiga pokok bahasan dalam *value for money* sangat terkait satu dengan lainnya. Ekonomi Hubungan ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1

Skematis Value For Money

a. Masukan (*Input*)

Merupakan sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan suatu kebijakan, program, dan aktivitas. Sebagai contoh: guru di sekolah, dokter di rumah sakit, tanah di jalan, dan sebagainya. *Input* dapat dinyatakan secara kuantitatif (jumlah guru, luas tanah, jumlah guru dsb), *input* dapat pula dinyatakan dengan nilai uang (biaya dokter, harga tanah, gaji guru dsb).

b. Keluaran (*Output*)

Hasil dari suatu program, suatu kegiatan, dan suatu kebijakan. Juga perlu diingat bahwa output yang diinginkan dan output yang tidak diinginkan lainnya adalah efek samping. Lebih sulit untuk mengukur output (kualitatif) dalam layanan sosial, pendidikan, keamanan dan kesehatan. Pengukuran kualitatif dapat diambil sebagai nilai tambah, atau nilai tambah sebagai peningkatan kualitas hidup.

c. Sasaran Utama (*Throughput*)

Analisis *value for money* memerlukan data masukan dan *output* yang memadai. Masalahnya adalah tidak tersedianya data *output* yang lengkap, sehingga sulit mengukur data *output* dan perlu digunakan *output* antara (*intermediate output*) atau

indikator kinerja (*performance indicator*), misalnya perbaikan kesehatan masyarakat, peningkatan harapan hidup.

d. Pencapaian Hasil (*Outcome*)

Outcome adalah dampak dari suatu kegiatan tertentu. Misalnya, hasil yang diharapkan dari kegiatan pengumpulan sampah Dinas Kebersihan Kota adalah terciptanya lingkungan perkotaan yang sehat dan bersih. *Outcome* seringkali dikaitkan dengan tujuan (*objectives*) atau target yang hendak dicapai. *Value for money* merupakan sebuah rangkaian indikator yang unsur-unsurnya merupakan satu kesatuan dari *input*, *output*, dan *outcome*.

Kegagalan organisasi sektor publik untuk mendapatkan input pada harga yang seharusnya menyebabkan indikator ekonomis yang tidak memuaskan. Selain itu, input yang terlalu mahal akan menyebabkan inefisiensi, yang pada akhirnya akan menyebabkan inefisiensi dalam penyampaian program secara keseluruhan. Nordiawan (2018) menjelaskan bahwa *value for money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi *output* saja, akan tetapi harus mempertimbangkan *input*, *output*, dan *outcome* tujuan pengukuran *value for money* yaitu mengukur tingkat keekonomisan dalam alokasi sumber daya, efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan hasil yang maksimal, serta efektivitas dalam penggunaan sumber daya (Mardiasmo, 2018 dalam Prihatiningsih, 2022).

2.4 Penelitian Terdahulu

Adapun hasil-hasil sebelumnya dari penelitian terdahulu mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

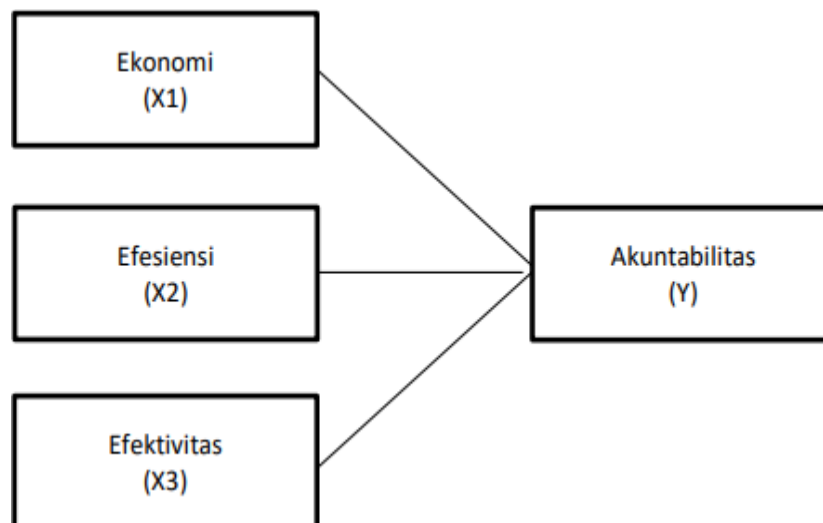
Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
	Analisis <i>value for money</i> pada Laporan	Metode Penelitian	Hasil penelitian ini membuktikan

A.B.Setiawan, W. Agustina (2018)	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Balai Penelitian Ternak Ciawi Bogor	<i>Purposive Sampling</i>	bahwa: harga saham tidak berpengaruh terhadap bid-ask spread. Sedangkan frekuensi perdagangan saham berpengaruh terhadap bid-ask spread
Hesti Ibrahim (2017)	Pengaruh Value For Money Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo	Metode Penelitian Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa value for money berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik, sistem pengendalian intern memiliki pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas publik
Esa Putera Perdana (2019)	Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kinerja <i>Value for Money</i> Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Survey pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Badan Pendapatan Daerah, dan Inspektorat di Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi)	Metode penelitian Purposive Sampling	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Benny Agus Trilaksono (2020)	Analisis <i>Value for Money</i> dan Akuntabilitas dalam Meningkatkan Pelayanan Publik	Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif	Hasil dari penelitian akuntabilitas yang diukur dengan LKJIP dan Standar Akuntansi Pemerintahan menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

			telah menjalankan kinerjanya dengan Akuntabel, dan penilaian dari pelayanan publik yang dikeluarkan telah memenuhi kebutuhan pengguna layanan publik.
Julie Abdullah (2018)	Pengaruh Penerapan Dimensi <i>Value For Money</i> Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato	Metode Penelitian Regresi berganda	Bahwa adanya pengaruh positif tersebut berarti semakin tinggi ekonomis, maka akuntabilitas publik akan semakin baik. Bahwa adanya pengaruh positif tersebut berarti semakin baik efisiensi, maka akuntabilitas publik akan semakin meningkat. Bahwa adanya pengaruh positif tersebut berarti semakin tinggi efektivitas, maka akuntabilitas publik akan semakin baik.

Laksmi Prihatiningsih (2022)	Pengaruh <i>Value For Money</i> Terhadap Akuntabilitas Publik (Studi Kasus Pemerintahan Desa Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa)	Metode Penelitian kuantitatif <i>eksplanatory research</i>	Ekonomi tidak terdapat pengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Publik. Sedangkan Efisiensi menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Akuntabilitas Publik, dan Efektivitas menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Publik.
------------------------------	---	--	--

2.5 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

2.6 Bangunan Hipotesis

Berdasarkan tinjauan empiris hasil penelitian sebelumnya di atas maka hipotesis yang di ajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Dimensi ekonomis dalam konsep *value for money* berpengaruh terhadap akuntabilitas publik.

Teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*) mampu menjelaskan bagaimana ekonomi dapat mempengaruhi akuntabilitas publik. Dalam teori ini salah satu pengaruh faktor niat seseorang untuk berperilaku adalah persepsi kontrol (*Perceived Behavioral Control*). Faktor ini menjelaskan persepsi seseorang mengenai suatu kontrol perilaku mengenai kemudahan atau kesulitan. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraannya pemerintah daerah dituntut lebih responsif, transparan, dan akuntabel terhadap kepentingan masyarakat dengan menerapkan dimensi ekonomi dalam penggunaan dan pengelolaan sumber dana, (Effendy, 2018 dalam Prihatiningsih, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh (Prihatiningsih 2022); menemukan bahwa pada variabel ekonomi tidak terdapat pengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas publik. Berdasarkan penjelasan teori studi empiris terdahulu, maka dapat ditarik sebuah hipotesis yaitu :

H1 : Dimensi Ekonomis dalam Konsep Value For Money Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Publik di Pemerintahan Desa Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

Dimensi efisiensi dalam konsep *value for money* berpengaruh terhadap akuntabilitas publik.

Teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*) mampu menjelaskan bagaimana efisiensi dapat mempengaruhi akuntabilitas publik. Teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*) mampu menjelaskan bagaimana ekonomis dapat mempengaruhi akuntabilitas publik. Dalam teori ini salah satu pengaruh faktor niat seseorang untuk berperilaku adalah persepsi kontrol (*Perceived Behavioral Control*). Faktor ini menjelaskan persepsi seseorang mengenai suatu

kontrol perilaku mengenai kemudahan atau kesulitan.

Agus (2017) menjelaskan bahwa efisiensi atau daya guna adalah bagaimana bertindak dengan cara meminimalkan kerugian dalam penggunaan sumber daya ekonomi. Jadi efisiensi ini diukur dari rasio *output* dan *cost*. Pengelolaan keuangan dan sumber daya organisasi dengan menerapkan prinsip efisiensi dapat menyelenggarakan dan meningkatkan pencapaian akuntabilitas organisasi baik kepada pemerintah pusat maupun kepada masyarakat (Prihatiningsih 2022). Penelitian yang dilakukan oleh (Prihatiningsih 2022) menemukan bahwa pada variabel efisiensi terdapat pengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas publik. Berdasarkan penjelasan teori studi empiris terdahulu, maka dapat ditarik sebuah hipotesis yaitu :

H2 : Dimensi Efisiensi dalam Konsep Value For Money Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Publik di Pemerintahan Desa Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

Dimensi Efektivitas dalam konsep *value for money* berpengaruh terhadap akuntabilitas publik.

Teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*) mampu menjelaskan bagaimana ekonomi dapat mempengaruhi akuntabilitas publik. Dalam teori ini salah satu pengaruh faktor niat seseorang untuk berperilaku adalah persepsi kontrol (*Perceived Behavioral Control*). Faktor ini menjelaskan persepsi seseorang mengenai suatu kontrol perilaku mengenai kemudahan atau kesulitan.

Mahmud (2019) menjelaskan bahwa efektivitas menggambarkan seluruh siklus *input*, proses dan *output* yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Hal ini berarti, bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki. Penelitian yang dilakukan oleh (Prihatiningsih 2022) menemukan bahwa pada variabel efektivitas tidak terdapat

pengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas publik. Berdasarkan penjelasan teori studi empiris terdahulu, maka dapat ditarik sebuah hipotesis yaitu :

H3 : Dimensi Efektivitas dalam Konsep Value For Money Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Publik di Pemerintahan Desa Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.